

ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN MELALUI RASIO KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Yuliyanti Anggraini Siregar

NPP. 30.0601

Asdaf Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: yulianti.siregar51@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Paryoto, SE., MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): financial independence through financial ratios in local governments in managing the regional income and expenditure budget for the City of Tangerang in 2018 to 2021 based on the independence ratio. Financial performance is the extent to which a work result is achieved in the area of regional finance which includes beneficiaries and regional spending, using financial indicators stipulated in laws and regulations for one time. (**Purpose:** . The results of this study are that the financial performance of the Tangerang City regional government is still relatively inadequate in funding its governance **Method:** The research method used is the qualitative research procedure, the information collection method used is interview, observation and documentation. **Result:** Faktors that impede the financial performance of the Regional Financial Management Board, namely the output of the financial performance of the Tangerang City regional government has not been maximized, regional original income (PAD) is still not on target and experiencing problems due to inefficient use of funds, and uncertainty in organizational output. **Conclusion:** The results of this study are that the financial performance of the Tangerang City regional government is still relatively inadequate in funding its governance. Faktors that impede the financial performance of the Regional Financial Management Board, namely the output of the financial performance of the Tangerang City regional government has not been maximized, regional original income (PAD) is still not on target and experiencing problems due to inefficient use of funds, and uncertainty in organizational output.

Keywords: regional original income , transfer income

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): kemandirian keuangan melalui rasio keuangan pada pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tangerang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan rasio kemandirian. Kinerja keuangan adalah sejauh mana tercapainya suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerima manfaat dan belanja daerah, dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan selama satu kali. Sedangkan kemandirian keuangan daerah atau disebut juga derajat otonomi fiskal merupakan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahannya dengan mengurangi ketergantungan dana eksternal seperti Pemerintah Pusat. **Tujuan:** kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang masih relatif kurang memadai dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahannya. **Metode:** Tata cara riset yang digunakan ialah tata cara riset kualitatif, metode pengumpulan informasi yang digunakan merupakan wawancara, observasi serta dokumentasi. **Hasil:** Hasil dari penelitian ini yakni kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang masih relatif kurang memadai dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahannya. **Kesimpulan:** Hasil dari penelitian ini yakni kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang masih relatif kurang memadai dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahannya. Faktor yang menghambat dalam kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yaitu berupa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang belum maksimal, Pendapatan Asli Daerah masih belum tepat sasaran dan mengalami kendala karena penggunaan dana yang tidak efisien, dan Ketidakpastian hasil organisasi.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desentralisasi merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah, dimana tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diserahkan kepada pemerintah daerah. Pekerjaan ini dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tetap diarahkan oleh Undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat sebagai peralihan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang 25 Tahun 1999. Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (6) memberikan pengertian otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Yang dimaksud dengan hak dalam rangka otonomi daerah adalah hak daerah yang dijelaskan dalam Pasal 21 dalam melaksanakan otonomi, daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; memilih pemimpin daerah; mengelola perangkat daerah; mengelola kekayaan daerah; memungut pajak daerah dan retribusi daerah; memperoleh bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di daerah; memperoleh sumber penghasilan lain yang sah; memperoleh hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan.

Dimensi keuangan daerah otonom yang paling krusial yang akan dikaji adalah kemandirian keuangan daerah otonom Kota Tangerang di Provinsi Banten. Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah dimensi efektivitas keuangan daerah otonom sebagai indikator keberhasilan daerah dalam

merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan meliputi efektivitas dan kemandirian keuangan daerah setiap tahunnya. Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui trendnya. Dengan analisis ini, pemerintah pusat dapat mengukur otonomi fiskal daerah dalam mendanai penyelenggaraan otonomi daerah, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas realisasi pendapatan daerah, menentukan sejauh mana pendapatan daerah dibelanjakan oleh pemerintah pusat, melacak perluasan keuangan daerah, dan mengidentifikasi kepentingan relatif dari berbagai aliran pendapatan. (Abdul Halim: 2008). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kota Tangerang tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan rasio kemandirian.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kota Tangerang merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Banten dan telah menerapkan otonomi daerah yang memanfaatkan sejumlah sumber daya yang dimiliki daerah. Namun Kota Tangerang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, hal ini terlihat dari masih sangat besarnya pendapatan transfer dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Pemerintah harus melakukan upaya dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada yang akan digunakan untuk belanja. Terjadi peningkatan pendapatan asli daerah Kota Tangerang tahun 2019 di Kota Tangerang karena apa tahun sebelumnya realisasi belum mencapai 100% sehingga pada tahun 2020 anggaran pendapatan asli daerah berkurang. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 4.277.659.353.829,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 3.648.663.446.803,00 daerah ini tidak dapat dianggap otonom karena rendahnya jumlah pendapatan asli daerah relatif terhadap transfer. Hal ini juga dikarenakan pendapatan asli daerah belum mampu memenuhi kebutuhan daerah sehingga Kota Tangerang membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini menerima transfer pusat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian oleh Sandy Candra Saputra, I wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembran tahun Kabupaten Jembrana dalam mengelola pendapatan daerah tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat diambil beberapa simpulan diantaranya dilihat dari varian atau selisih pendapatan termasuk dalam kategori baik, dilihat dari rasio desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang, dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif (Sandy candra dkk,2018). Peneliti oleh Krisniawati, Muhammad Zulkarnain, Yuliana yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur untuk anggaran masih lebih besar bila dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian untuk subsidi pemerintah pusat, provinsi dan pinjaman mengalami perkembangan setiap tahun, hal ini dikarenakan kebutuhan daerah untuk pembangunan. Demikian halnya untuk belanja daerah setiap tahunnya terus meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah (krisniawati dkk ,2021). Peneliti oleh Putri Riri Septyaningrum yang berjudul Analisis Tingkat Efektivitas, Kemandirian Dan Desentralisasi Keuangan Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam Kinerja keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017 telah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu keadilan, kejujuran, usaha, inisiatif dan kreativitas tetapi belum maksimal (masih kurang baik) bila dilihat dari

hasil perhitungan kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio efektivitas yaitu belum tercapainya realisasi pendapatan asli daerah dengan target yang telah ditentukan dan dilihat dari perkembangan trend efektivitas yang masih tidak ada perkembangan selama periode tahun 2008-2017, rasio kemandirian yaitu masih tingginya tingkat ketergantungan Kota Bandar Lampung terhadap pemerintah pusat selama periode tahun 2008-2017 dan rasio desentralisasi fiskal yaitu masih kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat untuk menggali dan mengelola pendapatan selama periode tahun 2008-2017 (Putri,2018). Peneliti Budi Saputra yang berjudul Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Provinsi Jambi Tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode analisis deskriptif, diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi selama lima tahun masih berada dalam skala interval yang sangat rendah. Berada dalam skala interval 0,00-10,00%, yakni dengan rata-rata per kabupaten hanya sebesar 4,91% (budi,2015). Peneliti I Gusti Suryadi Mahardika, Luh Gede Sri Artini yang berjudul Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan Perbandingan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun dari tahun 2007 sampai tahun 2011 menunjukkan rata-rata sebesar 13,27 persen. Peranan PAD yang sangat kecil terhadap total penerimaan pendapatan dan berarti didalam penyusunan RAPBD di era otonomi belum didukung oleh kemandirian daerah secara finansial. (I gusti suryadi mahardika dkk,2012)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penulis membahas lebih mendalam terkait rasio kemandirian yang merupakan bagaimana daerah tersebut melalui perencanaan penganggaran keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui proses anggaran rasio kemandirian di Kota Tangerang Provinsi Banten serta mengetahui hambatan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan upaya mengatasi hambatan dalam proses perhitungan rasio kemandirian.

II. METODE

metode untuk memahami tujuan penelitian yang memandu peneliti melalui tahapan-tahapan melakukan penelitian, yang meliputi teknik dan prosedur yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Berbagai definisi dari para ahli mengenai metode penelitian kualitatif, Muri Yusuf (2014:329). Penulis mencari bukti dan menyelidiki sebuah permasalahan kemudian mencari solusi sebagai pemecah masalah yang diteliti untuk menemukan jawaban ilmiah terkait permasalahan yang ada. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi,wawancara dan dokumentasi (Sugiyono ,2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pemerintah Tangerang telah merespon dengan mempertahankan upaya untuk memperluas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota. Menurut Ketua Badan Pengelola Keuangan Daerah, salah satu inisiatif peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang adalah memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu berkolaborasi dan berinovasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat menginvestigasi setiap sumber Pendapatan

Asli Daerah (PAD) secara efisien. Sama halnya dengan keadaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pendapatan eksternal Pemerintah Daerah merupakan patokan yang menentukan rasio kemandirian keuangan daerah.

Tabel 1.

Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2018-2021 (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Eksternal	Rasio Kemandirian (%)
2018	1.864.315.584.947,00	2.586.667.447.255,00	72,08%
2019	268.409.715.469,00	2.817.003.429.715,00	95,27%
2020	1.649.002.723.454,00	2.233.551.911.464,00	73,84%
2021	1.869.216.636.383,00	2.999.140.509.102,00	62,32%
Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah			76,12%

Sumber : Data Sekunder diolah peneliti , 2022

Pada tahun 2018, rasio kemandirian keuangan wilayah Kota Tangerang sebesar 72,08%, seperti terlihat pada tabel 4.7 pada tahun 2019 meningkat menjadi 95,27%, dan pada tahun 2020 dan 2021 turun. Pada tahun 2019, 95,27 % Produk Domestik Bruto (PDB) suatu daerah akan berasal dari luar daerah, namun pada tahun 2021 angka tersebut turun menjadi 62,32 % . Evaluasi sebelumnya menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir, Kota Tangerang rata-rata memiliki rasio kemandirian daerah sebesar 76,12%. Tabel dan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Tangerang terhadap tingkat kemampuan keuangan daerah menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Tangerang antara 75% sampai dengan 100% dan dapat diklasifikasikan dalam pola hubungan "delegatif". Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah termasuk kategori sangat tinggi dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada.

3.1.1. Rasio Pertumbuhan

Dalam tahun anggaran tertentu atau selama bertahun-tahun anggaran, rasio ini dapat menunjukkan apakah pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan atau tidak. % tase tersebut menggambarkan upaya Pemerintah Kota Tangerang untuk mempertahankan atau menumbuhkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan. % tase ini berguna karena dapat mengungkapkan bagaimana pemerintah daerah menangani Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara independen dari pendanaan federal atau pembayaran transfer. Proporsi ini juga menunjukkan bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tumbuh sebagai hasil dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas basis perpajakannya.

Tabel 2.

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah tahun Sebelumnya (PAD t_0)	Pendapatan Asli Daerah tahun Setelah (PAD t_1)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)
1	2	3	4
2017-2018	1.991.898.969.395	1.864.385.584.947	-6,40%
2018-2019	1.864.385.584.947	2.027.112.805.905	8,72%
2019-2020	2.027.112.805.905	1.649.002.723.454	-18,65%
2020-2021	1.649.002.723.454	1.869.216.636.383	13,35%

Sumber: data sekunder diolah oleh penulis 2023

Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kota Tangerang memiliki pertumbuhan pendapatan terendah yang terlihat dari rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas; ini berarti kota kurang mampu mempertahankan atau menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai operasional pemerintah. Hal ini bisa terjadi jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dikelola dengan baik sehingga Pemkot Tangerang membutuhkan dana talangan dari pemerintah pusat. Jadi, Pemerintah Kota Tangerang memiliki pekerjaan rumah di sini berupa upaya terus-menerus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang.

3.2. Faktor-Faktor Penghambatan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang

Ketika pemerintah memberikan otonomi kepada suatu daerah, maka daerah tersebut akan lebih siap untuk mengembangkan kemampuan anggarannya dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang bebas guna meningkatkan taraf hidup warganya. Namun kenyataannya, hampir semua daerah di Indonesia, bahkan yang disebut daerah "otonom", belum benar-benar dapat dianggap mandiri atau memenuhi kebutuhan belanja daerahnya. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah diarahkan untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai aset yang telah dimiliki Pemerintah Daerah. Setiap pemerintah kota harus berharap untuk mencapai tujuannya dengan sedikit sumber daya. Hal ini juga menjadi tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Tangerang. Kinerja departemen keuangan akan meningkat, meskipun akan dipengaruhi oleh kekuatan internal dan eksternal.

3.3. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang

Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan Daerah Kota Tangerang dipengaruhi beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat kinerja keuangan dari pemerintah daerah Kota Tangerang. Faktor penghambat tersebut bersumber dari dalam maupun dari luar pemerintahan itu sendiri namun dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah Kota Tangerang telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah Kota Tangerang dengan berbagai keterbatasan dan beberapa Faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemerintah diantaranya ialah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kompetensi Pegawai

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti kompetensi pegawai merupakan faktor sangat berpengaruh pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang.

- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
Meningkatkan efektifitas pada setiap belanja daerah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu cara yang tepat dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kota Tangerang.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan public
Pemerintah daerah Kota Tangerang sebagai pengelola kekayaan daerah dengan mengelola penerimaan daerahnya terus melakukan upaya dalam mendorong peningkatan dalam pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian terkait proses perhitungan rasio kemandirian di kota Tangerang provinsi banten dilakukan dengan mengamati bagaimana proses perhitungan rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru yang telah ditetapkan. Di daerah Kota Tangerang masih sangat bergantung pada uang transfer untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, karena rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah selama empat tahun anggaran adalah 17,10%, sehingga masuk dalam kategori hubungan “instruktif”.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dari pengamatan yang dilakukan penulis selama dilapangan, bahwa faktor-faktor penghambat tersebut masih dapat teratasi dengan adanya semangat dan konsistensi dari pegawai di Pemerintah Daerah Kota Tangerang khususnya para pegawai yang ada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang untuk mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Para pegawai terpacu untuk bekerja secara jujur, adil dan bertanggungjawab dan demi untuk mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa upaya Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk mengatasi faktor-faktor penghambat kinerja keuangan, antara lain mengoptimalkan intensifikasi dan perluasan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan kewenangan dan potensi yang ada, dengan memperhatikan keadilan, kepentingan umum, dan kemampuan masyarakat, serta daya guna dan efisiensi pengelola keuangan daerah di bidang pendapatan daerah. kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang masih relatif kurang memadai dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahannya, hal ini terlihat dari temuan analisis rasio keuangan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 sampai dengan 2021 Analisis Kota Tangerang masih sangat bergantung pada uang transfer untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, karena rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah selama empat tahun anggaran adalah 17,10%, sehingga masuk dalam kategori hubungan “instruktif”.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian serta kemampuan peneliti terkait mendapatkan informasi lebih dalam secara detail dan menyeluruh akibat dari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan secara detail terkait pengelola keuangan daerah dengan rasio kemandirian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. 2014. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”*. Jakarta : prenadamedia group.
- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Budi Saputra; Yohanes Vyn Amzar; Purwaka H.P. (2015). ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAMBI. *Ekonomi* , 10.
- Febby Randria Ramadhani. (2016). *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan* (ekonomi pembangunan, Vol. 14).
- I Gusti Ngurah Suryadi Mahardika ; Luh Gede Sri Artini. (2012). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. *Ekonomi Dan Bisnis*.
- Krisniawati; Muhammad Zulkarnain; Yuliana. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Timur. *Manajemen Keuangan Syariah*, 5.
- Sandy Candra Saputra; I Wayan Suwendra; Fridayana Yudiaatmaja. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana . *Manajemen* , 4.
- Sugiyono.(2018).*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- <https://bpkd.tangerangkota.go.id/informasi/laporan-keuangan>. Informasi Lpaoran Keuangan BPKD Kota Tangerang. Senin 10 Oktober 2022